

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, salah satunya yaitu tuntutan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang selanjutnya disebut *good governance*. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah. Dengan demikian, tidak hanya memastikan peningkatan kinerja, juga menciptakan suatu lingkungan yang dapat mendorong dan memonitor terwujudnya akuntabilitas. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan *good governance*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan tujuan untuk membuat suatu uraian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek yang diteliti kemudian menggabungkan antar variabel yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja di bawah naungan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, wilayah Bandung dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Uji validitas dan reabilitas menggunakan korelasi *Product Moment* dan *Cronbach's Alpha*. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi linier sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengaruh sebesar 54,8% terhadap penerapan *good governance*. Sedangkan sisanya sebesar 45,2% merupakan pengaruh faktor lain diluar implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), seperti kepemimpinan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja kebijakan dan pengendalian manajemen.

Kata Kunci: Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penerapan *Good Governance*